

**ANALISIS PENGALAMAN PRA KOMITE AUDIT
TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN
PELAPORAN KEUANGAN**

**(Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di *Annual Report* BAPEPAM
Periode Tahun 2008-2012)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

SEKAR NIKEN KARTIKA

NIM. 12030110130174

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Sekar Niken Kartika

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110130174

Fakultas/Jurusan : Ekonomika Dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **Analisis Pengalaman Pra Komite Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di *Annual Report* BAPEPAM Periode Tahun 2008-2012)**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Sudarno, M.Si, Akt, Ph.D

Semarang, 3 Juni 2014

Dosen pembimbing

(Drs. H. Sudarno, M.Si, Akt, Ph.D)

NIP. 19650520 199001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Sekar Niken Kartika

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110130174

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **Analisis Pengalaman Pra Komite Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di *Annual Report* BAPEPAM Periode Tahun 2008-2012)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 Juni 2014.

Tim penguji:

1. Drs. H. Sudarno, M.Si, Akt, Ph.D ()
2. Dr. Endang Kiswara, S.E, M.Si, Akt ()
3. Drs. A. Santosa Adiwibowo, M.Si, Akt ()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Sekar Niken Kartika, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengalaman Pra Komite Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di *Annual Report* BAPEPAM Periode Tahun 2008-2012)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 3 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,

Sekar Niken Kartika

NIM. 12030110130174

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengalaman pra komite audit terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Tugas pra komite audit yang berperan sebagai alat yang diharapkan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari *annual report* BAPEPAM tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan perusahaan yang terkena sanksi BAPEPAM pasal 69 dan VIII.G.7 yang terdaftar dalam *annual report* BAPEPAM di tahun yang sama.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dimana jumlah data yang dianalisis sebanyak 50 perusahaan yang terdiri dari 25 perusahaan yang melakukan *fraud* dan 25 perusahaan non fraud. Kemudian dilakukan analisis data yang meliputi statistik deskriptif, multikolonieritas, dan regresi logistik. Untuk menganalisis data menggunakan software IBM SPSS 16.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalaman berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan dengan signifikansi sebesar 0.094.

Kata kunci: pengalaman pra komite audit, kecurangan pelaporan keuangan.

ABSTRACT

This research attempt to assure that the experience of pre committee audit can be more easily detect fraudulent financial reporting.. This study used secondary data taken from annual report BAPEPAM for year 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 and the companies list that investigated from pasal 69 and regulation number VIII.G.7 from annual report BAPEPAM in the same year.

This study used amount of data to be analyzed as many as 50 companies consisting of 25 companies that conduct fraud and 25 non-fraud companies. Using purposive sampling method, data analysis includes descriptive statistic, multikolinieritas and logistic regression. Analyzing data using IBM SPSS16 software.

Based on the survey results revealed that pre committee audit experience affect financial reporting fraud detection with a significance of 0.094.

Keywords: *pre-audit committee experience, fraudulent financial reporting.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Inna ma'al 'usri yusroo

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

FABIAYYI ALAA 'IRAABIKUMAA TUKADZDZIBAANN

“Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan”

(*Q.S.* Ar Rahman)

There's so many dreams that we have given up.

Take a look at all we've got,

and with this kind of love,

and what we've got here is enough.

(Hold on – Michael Buble)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak,Ibu, Eyang dan Kakak-kakakku tercinta

Sahabat dan teman – teman ku sayang

Serta semuanya diluar sana, yang tak pernah berhenti bermimpi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan kemudahan hidup, nikmat, dan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengalaman Pra Komite Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Annual Report BAPEPAM)”**.

Adapun skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Reguler 1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si, Akt, Ph.D selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan penjelasan, arahan serta koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

4. Bapak Daljono, S.E, M.Si, Akt selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan ibu tercinta, (Alm) Drs. Maryana, BA dan Wahyuni Trisunu Dewi, S.Pd atas kasih sayang, cinta yang luar biasa, pembelajaran hidup, pengorbanan dan do'a yang tak pernah tiada henti-hentinya. Terima kasih atas semua yang diberikan tanpa mengharapkan balas jasa apapun.
7. Kakak-kakakku tercinta, Wara Kusumahati, Sapta Hendrawan, Kusdiyanti Retno Pratiwi dan Arif Budi Wibowo. Terima kasih telah memberikan contoh dan teladan yang baik untuk adikmu yang luar biasa ini.
8. Khansa, ponakan kecilku, my moodbooster one.
9. Uyut, Pakde, Bude dan seluruh keluarga besar yang selalu menjadi semangat tersendiri untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Mas Dwi dan Bu Wike yang senantiasa membantu dan siap sedia dalam setiap saat penulis membutuhkan bantuan.
11. Seluruh staf administrasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran dan kelengkapan administrasi selama masa kuliah.

12. The party goers. Campa, Manggar, Capridiea, Risa, Acun, Anaiza, Aisha Achda. Thankyou for all the time we spent together.
13. Geng Krupuk - Dinar, Dibul “study-mate ever after”, Lela, Aik, Intan, Nana, Nonik walaupun jarang ketemu tapi terimakasih untuk kebersamaan dan persahabatan yang luar biasa ini.
14. Mba Caca, Depi, Watek, Nunung, Vita, Norma, Seno, Tomi, Widya, Nina, Jean, Shabrina, Rani, Vina Kholisa, Nanik, Vika, Indah dan seluruh keluarga besar Akuntansi Undip 2010. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan semangat yang diberikan.
15. Dee, Rara, Ani dan Bintang, You guys... the terrible but also missable :)
16. Teman-temanku satu bimbingan, Icut, Ica dan Fanniya. Terimakasih sudah berbagi semangat dan bantuan selama proses skripsi sampai wisuda. Juga Emmalia, partner “on last minute”, terimakasih untuk semua bantuan dan semangat di waktu-waktu perjuangan revisi sampai selesai semua :)
17. Pattimura’s, Lies, Dila, Vanes dan Niken. Amazingly January and February with you girls and also ‘bebanjiran’ experience.
18. Kawan-kawan KSMP (ECOFINSC) tersayang, terimakasih untuk semangat dan tawa ditiap pertemuannya.
19. Teman-teman KKN Tim II Kec. Candimulyo tersayang, Jeje, Adi, Yaumil, Fifi, Edi, Ka Liska, Bang Ucup Angel dan Ribka.
20. Keluarga besar BRI Pattimura yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk magang dan menggali pengalaman, ilmu serta keluarga baru disana.

21. Mas Faiz dan Mas Andrian. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang membantu kelancaran penelitian ini, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	14

2.1	Teori Keagenan	14
2.2	<i>Fraud and Error Theory</i>	15
2.3	Pengalaman	16
2.3.1	Pengalaman Tugas Komite Audit	17
2.4	Kecurangan (<i>Fraud</i>)	20
2.4.1	<i>Fraud Triangle</i>	24
2.4.2	Klasifikasi <i>Fraud</i>	25
2.5	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	26
2.5.1	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	26
2.6	Komite Audit	28
2.6.1	Prinsip-prinsip Komite Audit	29
2.6.2	Tugas Komite Audit	29
2.6.3	Fungsi Komite Audit	30
2.7	Hubungan Independensi Dengan Deteksi <i>Fraud</i>	31
2.8	Hubungan Kepemilikan Manajerial Dengan Deteksi	32
2.9	Hubungan <i>Leverage</i> Dengan Deteksi <i>Fraud</i>	33
2.10	Hubungan Ukuran Perusahaan Dengan Deteksi <i>Fra</i>	34
2.11	Hubungan Pertumbuhan Dengan Deteksi <i>Fraud</i>	35
2.12	Hubungan Ukuran KAP Dengan Deteksi <i>Fraud</i>	35
2.13	Penelitian Terdahulu	36
2.14	Kerangka Pemikiran	39
2.15	Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
3.1.1	Definisi Variabel Dependen	43
3.1.2	Definisi Variabel Independen	44
3.1.3	Definisi Variabel Kontrol	44

3.2 Populasi dan Sampel	48
3.3 Jenis dan Sumber Data	48
3.4 Metode Pengumpulan Data	49
3.5 Metode Analisis Data	49
3.5.1 Statistik Deskriptif	50
3.5.2 Pengujian Hipotesis	50
3.5.3 Uji Kelayakan Model (<i>Goodness-of-fit Test</i>)	51
3.5.4 Uji Kelayakan Keseluruhan Model	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	55
4.2 Analisis Data	57
4.2.1 Statistik Deskriptif	57
4.2.2. Pengujian Kelayakan Model (<i>Goodness-of-fit</i>)	58
4.2.2.1 Uji Hosmer and Lemeshow	59
4.2.3 Pengujian Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>)	60
4.2.3.1 <i>Cox-Snell's R Square dan Nagelkerke's R Square</i> ...	60
4.2.3.2 Uji Klasifikasi 2x2	61
4.2.3.3 Uji Multikolonieritas	62
4.3 Pengujian Hipotesis	63
4.4 Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan Penelitian	68

5.3 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Definisi <i>Fraud</i>	20
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Definisi Operasional	46
Tabel 4.1 Spesifikasi Sampel	55
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskripsi Statisti.....	57
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow</i>	59
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Cox And Snell's R Square</i> dan <i>Nagelkerke's R Square</i>	60
Tabel 4.5 Tabel Kasifikasi 2x2	61
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas	62
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1 Proses Pemilihan Sampel Penelitian	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A HASIL UJI REGRESI LOGISTIK	72
LAMPIRAN B UJI MULTIKOLINEARITAS	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan pelaporan keuangan saat ini makin marak terjadi di berbagai sektor, baik dalam organisasi sektor publik maupun privat. Praktek kecurangan pelaporan keuangan seakan menjadi suatu fenomena dalam praktik akuntansi sebuah entitas. Penyalahgunaan ini merupakan salah satu bentuk *fraud*. Menurut *Malaysian Approved Standards on Auditing* (2001), AI No. 240, kecurangan pelaporan keuangan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu atau lebih individu baik manajemen, pegawai maupun pihak ketiga yang menghasilkan laporan keuangan secara tidak benar.

Jumlah skandal kecurangan pelaporan keuangan juga semakin meningkat. Beberapa skandal kecurangan pelaporan keuangan terbesar yakni Enron, Worldcom dan Xerox. Terjadinya berbagai skandal ini juga telah menurunkan kepercayaan investor pada saat itu.

Skandal Enron bahkan telah memicu krisis dan mengguncangkan pasar saham di hampir seluruh negara di dunia. Enron merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas serta komunikasi. Enron juga merupakan penggabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Pada tahun 2000, Enron mengakui penghasilan sebesar 101 miliar Dollar AS. Dalam melaporkan kondisi keuangannya, Enron melakukan manipulasi laporan

keuangannya secara sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Enron mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi yang dilakukan Enron lebih didasari oleh faktor moral hazard dan dorongan agar saham mereka tetap laku di bursa. Skandal ini juga turut melibatkan KAP Arthur Andersen yang ditunjuk sebagai auditor eksternal Enron. Kasus ini mengakibatkan 4.000 pegawai Enron kehilangan pekerjaan mereka dan menyebabkan turunnya kepercayaan investor pada masa itu terhadap keandalan dari laporan keuangan perusahaan.

Di Indonesia, skandal fraud terbesar juga pernah dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk. Skandal fraud yang dilakukan perusahaan farmasi milik negara ini dideteksi oleh Kementerian BUMN dan Bapepam (Bapepam, 2002) yang menemukan adanya lebih saji (*overstatement*) pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3 % dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Secara terinci, lebih saji (*overstatement*) dari laporan laba rugi tersebut adalah penyajian di atas nilai yang sebenarnya dari penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha dan penggelembungan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh direktur produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT Kimia Farma per 31 Desember 2001 (BAPEPAM, 2002). Selain itu manajemen PT Kimia Farma melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha.

Di sektor perbankan, kasus yang masih hangat di benak publik Indonesia adalah skandal Bank Century. Bank swasta ini merupakan hasil penggabungan tiga bank yaitu Bank CIC, Bank Piko, dan Bank Danpac di tahun 2004.

Setelah dua bulan merger, rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 132.5%. Dalam kondisi ini, seharusnya Bank Indonesia menetapkan Century sebagai bank dalam pengawasan khusus, namun nyatanya Bank Indonesia hanya menetapkan bank dalam pengawasan intensif. Masalah lain adalah bahwa Bank Century juga memiliki masalah dengan penerbitan surat berharga dan perkreditan yang berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan. Di tahun 2005 Bank Indonesia menemukan bukti bahwa Century melakukan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Dalam perjalanannya, Century mengalami gagal kliring yang mengakibatkannya tidak bisa membayar dana permintaan nasabah dan akhirnya Century mengajukan fasilitas pendanaan darurat. Tiga tahun kemudian, Robert Tantular selaku komisaris utama akhirnya ditahan pihak kepolisian karena diduga telah mempengaruhi kebijakan direksi yang mengakibatkan Bank Century gagal kliring. Akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun meminta agar dilakukan audit terhadap Century di tahun 2009. Seiring berjalannya waktu, Direktur Utama Bank Century akhirnya divonis tiga tahun penjara karena terbukti menggelapkan dana nasabah.

Saat ini ada tiga bentuk kecurangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah. Tiga bentuk kecurangan tersebut dicetuskan oleh *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* yakni sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)
- b. Korupsi (*Corruption*)
- c. Kecurangan pelaporan keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*)

Penyalahgunaan aset meliputi penggelapan penerimaan kas, pencurian aktiva dan hal-hal yang menyebabkan suatu entitas membayar untuk barang dan jasa yang diterimanya. Menurut Wilopo (2006) dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di sisi lain, kecurangan dalam pelaporan keuangan meliputi tindakan kesengajaan untuk memanipulasi, memalsukan catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari laporan keuangan, menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan keuangan dan dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah.

Berbagai skandal kecurangan (*fraud*) disebabkan oleh beberapa faktor. Teori GONE yang dicetuskan oleh J. Bologna mencoba menjelaskan empat faktor pendorong fraud yaitu :

1. Keserakahan (*Greed*)
2. Kesempatan (*Opportunity*)
3. Kebutuhan (*Need*)
4. Pengungkapan (*Exposure*)

Faktor keserakahan dan kebutuhan merupakan faktor internal yang berhubungan dengan diri pelaku *fraud*, sementara kesempatan dan pengungkapan adalah faktor eksternal atau faktor yang berhubungan dengan entitas sebagai korban kecurangan (*fraud*).

Disisi lain, ada pula lima faktor yang digunakan seorang auditor untuk dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan (Hutomo, 2012) yakni melalui:

a. Pendekatan audit forensik

Akuntansi forensik lebih menekankan pada penyimpangan (*irregularities*), pola tindakan kesalahan (*errors*) dan kelalaian (*omissions*). Prosedur utama dalam akuntansi forensik menekankan pada teknik wawancara yang mendalam (*in depth interview*). Akuntansi forensik menangani kecurangan, khususnya dibagian korupsi dan penyalahgunaan.

b. *Good Corporate Governance (GCG)*,

Pendekatan ini menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham melalui peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), transparansi dan penjelasan, serta peranan dewan komisaris dan komite audit (Alison, 2010).

c. Manajemen laba

Manajemen laba dapat mengurangi reliabilitas dan relevansi laporan keuangan yang merupakan prinsip utama laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Menurut Scott (2003) beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba diantaranya motivasi bonus, motivasi kontrak, motivasi politik,

motivasi pajak, pergantian CEO, penawaran saham perdana (IPO) dan motivasi pasar modal.

d. Pendekatan pengendalian internal

Pendekatan ini lebih kepada bagaimana perusahaan mencapai keyakinan efektivitas dan efisiensi operasinya. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* terdapat 5 komponen yang saling terkait dalam pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

e. Rasio-rasio finansial.

Analisis dari angka-angka yang tersusun di dalam laporan keuangan. Dengan menghitung berbagai perbandingan proksi finansial perusahaan diharapkan dapat mendeteksi fraud dengan lebih mudah.

Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan melalui *good corporate governance* (GCG). Di dalam sebuah entitas fungsi pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh dewan komisaris. Dalam sebuah perusahaan, dewan komisaris membentuk sebuah komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian entitas. Namun sepanjang dekade ini efektivitas komite audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan sering dipertanyakan. Jika dikaitkan dengan berbagai skandal kecurangan pelaporan keuangan yang lalu, itu semua terjadi lebih karena lemahnya sistem pengendalian internal. Berbagai

bentuk manipulasi membuat dunia bertanya kemana peran komite audit sebagai ujung tombak pengendalian internal perusahaan?

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance (GCG)* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI, 2010).

Di Indonesia, penyelenggaraan komite audit telah menjadi kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Hal ini diimplementasikan melalui peraturan No.: Kep-339/BEJ/07-2001 pada tanggal 1 Juli 2001 mengenai pembentukan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris dewan bagi perusahaan publik yang terdaftar. Sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan Bursa Efek Jakarta, BAPEPAM pun mengeluarkan regulasi melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam perbankan, Bank Indonesia juga mengeluarkan aturan mengenai komite audit melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum; dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Independensi, keahlian keuangan, aktivitas, masa kerja dan komposisi komite audit menjadi syarat penting dalam pembentukan komite audit. *Blue Ribbon Committee (BRC)* pada tahun 1999 merekomendasikan bahwa perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek harus memiliki komite audit yang sepenuhnya independen dan paling tidak satu ahli keuangan.

Sarbanes-Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 juga memberi mandat kepada seluruh perusahaan terdaftar untuk memiliki komite audit yang sepenuhnya independen dan memiliki paling tidak satu ahli keuangan. Hal ini dilakukan sebagai usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah terjadinya berbagai skandal kecurangan (*fraud*) pelaporan keuangan. *SOX* juga menambahkan fungsi komite audit yaitu bertugas secara langsung memilih, mengkompensasi dan mengawasi eksternal auditor.

Berbagai penelitian mengenai peran komite audit banyak dilakukan. Beasley pada tahun 1996 tidak menemukan bahwa keberadaan komite audit secara signifikan berhubungan dengan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Dechow et.al (1996) dan McMullen (1996) yang menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan negatif antara keberadaan komite audit dan kecurangan (*fraud*) pelaporan keuangan.

Penelitian yang lebih kompleks dilakukan oleh Owen-Jackson et al (2009) dengan memadukan pengaruh karakteristik komite audit dan proses kontrak yang

merupakan karakteristik perusahaan dan hasilnya menyatakan bahwa perusahaan dengan komite audit yang sepenuhnya independen, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan namun *leverage* tidak berpengaruh. Penelitian Owen-Jackson menggunakan independensi, keahlian keuangan, jumlah pertemuan dan masa kerja sebagai proksi karakteristik komite audit. Sementara proses kontrak lebih identik dengan karakteristik perusahaan yakni kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, *leverage* dan pertumbuhan perusahaan.

Abbott, Parker dan Peters (2004); Bedard, Chtourou dan Courteau (2004); Beasley (1996); Beasley et al. (2000) menemukan bahwa independensi komite audit dan keahlian keuangan dapat meningkatkan proses pelaporan keuangan dimana dalam penelitian ini tidak menggunakan faktor yang berhubungan dengan karakteristik perusahaan.

Penelitian – penelitian terdahulu lebih fokus terhadap keahlian keuangan yang diukur dengan tingkat pendidikannya. Hal tersebut senada dengan regulasi *Blue Ribbon Committee* dan BAPEPAM yang mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya komite audit terdiri dari 3 anggota, dimana minimal satu orang merupakan anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Namun, dalam penelitian ini penulis menaruh perhatian terhadap pengaruh keahlian lain yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Disini keahlian diukur dengan pengalaman bertugas di masa lalu atau pengalaman pra komite audit.

Dimana pengalaman tersebut dilihat mampu mendeteksi *fraud* khususnya pelaporan keuangan dengan lebih efektif.

Pengalaman audit yang dimiliki oleh seorang komite audit dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan setiap prosedur pemeriksaan. Terlebih pengalaman pra komite audit sebagai pemeriksa, akuntan dan/atau dalam bidang keuangan yang relevan dengan tugas dan fungsi komite audit. Semakin berpengalaman maka tingkat kepekaan terhadap segala bentuk ketidakberesan pelaporan keuangan dalam entitas akan mudah terbaca. Pelatihan baik formal maupun non formal, sertifikasi, observasi, jabatan sebelumnya, banyaknya penugasan akan memperluas wawasan yang dimiliki seorang komite audit.

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk mendeteksi *fraud* yakni pengalaman tugas pra komite audit. Dilihat dari penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan variabel pengalaman tugas komite audit sebagai variabel pendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Maka penulis pun mencoba menggunakan variabel pengalaman bertugas komite audit sebagai variabel independen pendeteksi kecurangan pelaporan keuangan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya untuk menguji penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya tentang pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan dengan variabel independen yang berbeda yakni pengalaman tugas pra komite audit. Owen-Jackson *et al* (2009), Abbott, Parker dan Peters (2004); Bedard,

Chtourou dan Courteau (2004); Beasley (1996); Beasley et al. (2000) menggunakan keahlian keuangan dengan tingkat pendidikan sebagai proksinya dan hasilnya pun beragam.

Pengalaman tugas pra komite audit dianggap relevan dan mampu mendeteksi secara lebih baik adanya penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Dengan pengalaman bertugas dan menangani berbagai masalah yang kompleks, jam terbang audit yang tinggi dan problem akuntansi yang rumit diharapkan akan menghasilkan keahlian komite audit yang lebih mumpuni.

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Apakah pengalaman tugas pra komite audit mampu mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan secara lebih efektif?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris atas pengaruh pengalaman bertugas pra komite audit dalam mendeteksi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memacu minat dan memberikan pemahaman berkelanjutan mengenai pengaruh pengalaman bertugas pra komite audit terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pengaruh pengalaman bertugas pra komite audit terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

3. Bagi Penelitian Mendatang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian mendatang mengenai pengalaman bertugas pra komite audit serta pengaruhnya terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

- b. Manfaat Praktikal

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam hal tata kelola perusahaan yang baik terutama mengenai pengaruh pengalaman bertugas pra komite audit dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan.

2. Bagi Investor

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan untuk mempertimbangkan aspek-aspek terutama pengalaman bertugas pra komite audit dalam mempengaruhi reliabilitas laporan keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian ini dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam bab ini dijelaskan pula kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dioperasionalkan dalam penelitian. Uraian tersebut meliputi definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, dan metode analisis data.

BAB IV :ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini diuraikan deksripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil serta dijelaskan pula argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori agensi (*agency theory*) pertama kali digunakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menjadi landasan dalam penelitian ini, dimana dalam teori ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*).

Dalam kaitannya dengan kecurangan pelaporan keuangan, teori agensi mencoba menjelaskannya melalui tujuan prinsipal dan agen yang bertentangan. Masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya masing-masing. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas demi kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Sementara *agent* bertindak diluar keinginan *principal* dengan berusaha memaksimalkan kewenangannya dan bertindak oportunistik, misalnya dengan melakukan manipulasi pada laporan keuangan sehingga informasi yang terkandung didalamnya tidak memenuhi prinsip reliabilitas dan relevansi sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Dalam kaitannya dengan komite audit, teori agensi membantu komite audit untuk memahami kepentingan yang mungkin muncul antara *principal* dan *agent*. Dengan adanya komite audit yang berpengalaman diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh *agent*. Karena komite audit yang berpengalaman akan lebih sensitif dalam mendeteksi segala bentuk

kecurangan sekaligus mengevaluasi kinerja *agent* sesuai dengan kompleksitas masalah yang ada. Pengalaman pra komite audit yang diperoleh pastinya akan lebih membantu dalam memecahkan masalah yang ada dan mencari solusinya sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan.

2.2 *Fraud and Error Theory*

Menurut Holmes dan Overmyer (1975) kecurangan harus dibedakan dengan kesalahan. Kesalahan (*error*) dapat dideskripsikan sebagai suatu yang tidak disengaja dan ini dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Kesalahan yang timbul karena kesengajaan biasanya dilakuakn oleh orang-orang yang tidak jujur. Sedangkan kesalahan yang tidak disengaja timbul karenakurangnya ketelitian, kehati-hatian dan pengetahuan. Sementara kecurangan (*fraud*) adalah kesalahan yang bersifat disengaja dan biasanya bertindak melalui penipuan, penyalahgunaan dan manipulasi.

Kesalahan dan kecurangan merupakan bentuk lemahnya pengendalian internal. Pengendalian internal entitas yang lemah memungkinkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diminimalisir.

Berbagai bentuk kesalahan dan kecurangan adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan yang disengaja (*intentional error*)
- b. Kesalahan yang tidak disengaja (*unintentional error*)

- c. Kolusi (*collusion*)
- d. Kecurangan karyawan dan manajemen (*employee and management fraud*)
- e. Kejahatan kerah putih (*white-collar crime*)
- f. Penggelapan (*embezzlement*)
- g. Kejahatan komputerisasi (*computer crime*), dan lain-lain.

Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang baik melalui pengawasan dan pengendalian dari komite audit. Dengan riwayat pengalaman penugasan pra komite audit sebelumnya khususnya sebagai auditor, akuntan dan atau bidang keuangan tentunya memungkinkan dilakukannya upaya mitigasi secara maksimal.

2.3 Pengalaman

Definisi pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 1984). Sementara menurut *Oxford English Dictionary*, pengalaman diartikan sebagai berikut:

“Practical contact with and observation of facts or events, the knowledge or skill acquired by a period of practical experience of something, especially that gained in a particular profession or an event or occurrence which leaves an impression on someone”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah suatu proses di masa lalu yang dijalani seseorang terlebih pada suatu pekerjaan tertentu yang membuat seseorang lebih memahami pekerjaannya dengan pembentukan pengetahuan dan keterampilan secara lebih mendalam.

Keunggulan seseorang yang berpengalaman dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas seseorang karena adanya pengembangan keahlian dan hal tersebut cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Seorang dengan cukup banyak pengalaman di bidang tertentu tentu akan lebih menguasai pekerjaan dan tanggungjawabnya sehingga mereka pun cenderung disebut sebagai ahli di bidangnya.

2.3.1 Pengalaman Tugas Komite Audit

Pengalaman seseorang dalam bekerja dapat diukur melalui dua cara yakni lamanya waktu bertugas dan tingginya keahlian yang dimiliki. Purnamasari (2005:3) memberikan pengertian bahwa pengalaman kerja yang tinggi akan lebih unggul dalam beberapa hal, diantaranya :

- a) Dalam mendeteksi kesalahan
- b) Memahami kesalahan
- c) Mencari penyebab munculnya kesalahan.

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja (Handoko, 1984 : 241). Beberapa faktor tersebut adalah :

- 1) Latar belakang pribadi yang mencakup pendidikan, kursus, latihan, bekerja. Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang di waktu yang lalu.
- 2) Bakat dan minat digunakan untuk memperkirakan minat dan kemampuan seseorang.
- 3) Sikap dan kebutuhan (*attitudes and needs*) untuk meramalkan tanggung jawab dan wewenang seseorang.

- 4) Kemampuan – kemampuan analitis dan manipulatif untuk mempelajari kemampuan penilaian dan penganalisaan.
- 5) Keterampilan dan kemampuan teknik, untuk menilai kemampuan dalam pelaksanaan aspek – aspek teknik pekerjaan.

Pada tahun 2001, Foster juga mengemukakan beberapa indikator penilaian pengalaman kerja:

- a. Lama waktu/ masa kerja.

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

- b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

- c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek – aspek teknik peralatan dan tehnik pekerjaan.

Salah satu bukti empiris pentingnya pengalaman dalam dunia akuntan terlebih komite audit yang merupakan tombak dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan yakni terdapat regulasi yang mengatur tentang jasa akuntan publik.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/Kmk.017/1999 tentang pasal 7 yang isinya:

“Untuk memperoleh izin akuntan, seseorang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan u.p. Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. berdomisili di wilayah Indonesia;*
- 2. memiliki register akuntan;*
- 3. menjadi anggota IAI;*
- 4. lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh IAI;*
- 5. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) jam dengan reputasi baik;*
- 6. telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.*

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kebutuhan akan pengalaman seorang komite audit itu diperlukan. Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi seorang komite audit untuk memperkaya teknik dan ketrampilan audit khususnya pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Menurut Ayuningtyas (2012), semakin tinggi pengalaman seorang auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor mengusai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Pengalaman juga membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa. Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman auditor memberi kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor.

2.4 Kecurangan (*Fraud*)

Definisi *fraud* secara umum sangat bermacam-macam. Berikut adalah beberapa definisi *fraud* dari berbagai sudut pandang :

Tabel 2.1
Definisi *Fraud*

Narasumber	Definisi
<i>Institute of International Auditors (IIA)</i>	Setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada aplikasi kekerasan atau ancaman kekerasan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh partai dan organisasi untuk memperoleh kekayaan uang, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau hilangnya layanan atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.
<i>Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2006</i>	Penggunaan pekerjaan seseorang untuk pengkayaan pribadi melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan sumber daya organisasi atau aset.
BPK RI	<i>Fraud</i> adalah salah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu.

<i>Collins Dictionary</i>	<i>Fraud</i> adalah penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikan mereka, biasanya untuk memiliki sesuatu/harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara yang tidak adil/curang.
---------------------------	--

Menurut Taylor and Glezen (1997:130), *fraud* didefinisikan terjadi melalui tiga hal, yaitu:

1. Manipulasi, pemalsuan atau mengubah catatan akuntansi maupun dokumen pendukung laporan keuangan yang disajikan.
2. Kesalahan dalam merepresentasikan atau mengabaikan pengungkapan secara sengaja kejadian, transaksi atau informasi penting lainnya.
3. Penyalahgunaan prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, klasifikasi dan cara penyajian secara sengaja.

The National Association of Certified Fraud Examiners menemukan beberapa alasan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut :

- a. Untuk membuat saham perusahaan terlihat lebih menarik dan mendorong investasi.
- b. Untuk meningkatkan laba per saham dan meningkatkan dividen.

- c. Untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan atau persyaratan yang lebih menguntungkan pada pembiayaan yang ada.
- d. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
- e. Untuk menghasilkan bonus berdasarkan kinerja keuangan.

Penelitian tentang kecurangan pelaporan keuangan juga pernah dilakukan oleh salah satu kantor akuntan publik terbesar di dunia yakni KPMG. Hasilnya adalah KPMG mencoba mengembangkan model penelitian yang dapat memberikan pemahaman tentang indikator-indikator yang memicu terjadinya kecurangan pelaporan keuangan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kondisi (*condition*) yaitu tingkatan dimana suatu kecurangan dilakukan manajemen yang bersifat material dapat terjadi. Misalnya dalam pengambilan keputusan dimana hasil keputusan tersebut didominasi oleh satu atau beberapa orang saja atau lemahnya internal kontrol perusahaan.
2. Motivasi (*motivation*) yaitu tingkatan dimana orang-orang yang mempunyai posisi dalam entitas mempunyai alasan atau motivasi untuk melakukan kecurangan manajemen. Misalnya karena terdorong oleh sistem kompensasi yang berdasarkan catatan kinerja.
3. Sikap (*attitude*) yaitu tingkatan dimana orang-orang yang mempunyai posisi dalam entitas mempunyai sikap atau seperangkat nilai-nilai etis yang memungkinkan mereka untuk melakukan *management fraud*.
Indikasi dari indikator ini misalnya auditor mendeteksi adanya

ketidakjujuran dalam manajemen atau frekuensi pergantian auditor yang sering.

Dalam penelitian ini kecurangan pelaporan keuangan diidentifikasi melalui laporan tahunan yang melanggar pasal 69 UU Pasar Modal tentang Standar Akuntansi dan peraturan VIII. G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang isinya sebagai berikut:

Bagian Ketiga :Standar Akuntansi

Pasal 69

- (1) *Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.*
- (2) *Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal*

Peraturan Nomor VIII.G.7

Pedoman Penyajian Laporan Keuangan

- a) *Peraturan ini menetapkan bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).*
- b) *Peraturan ini merupakan pedoman penyajian laporan keuangan bagi industri secara umum. Hal-hal mengenai bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.*
- c) *Laporan keuangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam PSAK yang diterbitkan oleh IAI,*

yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- d) Seluruh data yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas terbuka dan tersedia untuk publik

2.4.1 Fraud Triangle

Menurut teori dari Donald Cressey's, ada tiga elemen pembentuk *fraud* yang dikenal dengan *fraud triangle* atau segitiga fraud, yaitu:

a. Tekanan (*Pressure*)

Dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan (*fraud*). Sebagian besar tekanan yang terjadi disebabkan oleh masalah finansial, namun sebagian lain terdorong oleh keserakahan.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Terbentuk melalui peluang yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan (*fraud*). Biasanya disebabkan karena lemahnya pengendalian internal suatu organisasi misalnya kurangnya pengawasan dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara tiga elemen *fraud triangle*, kesempatan merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, kontrol dan upaya deteksi dini terhadap fraud.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Elemen ini terjadi dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya:

- Motif tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.

- Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi).
- Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil sebagian keuntungan tersebut.

2.4.2 **Klasifikasi *Fraud***

The ACFE's Uniform Occupational Fraud Classification sebagai pihak pemeriksa *fraud* yang bersertifikasi, menggambarkan tiga jenis utama dari *fraud* yang dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*”, yakni :

a. Penyalahgunaan Aset (*Asset Missappropriation*)

Tindakan ini melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi, misalnya menggelapkan pendapatan, mencuri persediaan dan penipuan penggajian.

b. Korupsi (*Corruption*)

Penyalahgunaan pengaruh dimana pelaku dalam transaksi bisnis mendapatkan beberapa keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban mereka untuk majikan mereka atau hak-hak orang lain, misalnya suap (*bribery*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

c. Kecurangan dalam laporan keuangan (*Fraudulent Of Financial Statement*)

Umumnya melibatkan pemalsuan laporan keuangan (misalnya, *revenue overstatement*).

2.5 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola atau *corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah *good corporate* pada prinsipnya adalah sistem pengelolaan perusahaan yang menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham melalui peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), transparansi dan penjelasan, serta peranan dewan komisaris dan komite audit (Alison, 2010).

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

dikutip oleh Putri (2011) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance” (OECD, 1999:9).”

2.5.1 Prinsip *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mengeluarkan asas-asas dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.6 Komite Audit

Tata kelola perusahaan salah satunya adalah melalui fungsi pengawasan. Dalam perusahaan, fungsi pengawasan tersebut dilakukan oleh komite audit sebagai *controller* untuk menerapkan *check and balances* serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan terutama kaitannya dengan pelaporan keuangan. Definisi komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG,2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia adalah :

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Sementara menurut Keputusan Bapepam no.IX 1.5 tahun 2004 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya dalam sebuah perusahaan.

2.6.1 Prinsip-prinsip Komite Audit

Dalam pelaksanaannya, komite audit menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan konsep *Good Corporate Governance* yaitu independensi, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan

Selain itu, melalui keputusan tersebut BAPEPAM juga mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya komite audit terdiri dari 3 anggota, dimana minimal satu orang merupakan anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. BAPEPAM juga menghimbau bahwa setidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

2.6.2 Tugas Komite Audit

Menurut Keputusan Bapepam No. IX 1.5 tahun 2004 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit tugas Komite Audit Independen adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

2.6.3 Fungsi Komite Audit

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Tugas dan tanggung jawab komite audit juga dipertegas melalui Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyebutkan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dewan komisaris.

2.7 Hubungan Independensi Dengan Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan

Independensi merupakan faktor utama dalam yang harus dimiliki seorang pemeriksa terlebih komite audit. Dalam berbagai regulasi, independensi selalu menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi. Prinsip independensi sangat difokuskan terutama dalam hal menjaga kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Pentingnya independensi pada komite audit ditegaskan oleh Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-29/PM/2004 tgl. 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yakni sebagai berikut :

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
4. Tidak mempunyai:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan atau
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Dengan adanya tingkat independensi yang memadai diharapkan komite audit dapat lebih mengedepankan profesionalisme kerja dan skeptisme sehingga tidak terpengaruh akan tekanan maupun kepentingan lain. Kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi pun menjadi dapat terdeteksi dengan cepat dan baik tanpa adanya kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun.

2.8 Hubungan Kepemilikan Manajerial Dengan Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki langsung oleh dewan komisaris maupun dewan direksi yang aktif dalam sebuah perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) penambahan kepemilikan

manajerial memiliki keuntungan untuk mensejajarkan kepentingan manajer dan pemilik saham. Owen-Jackson pun menambahkan bahwa jika manajemen memiliki saham dari perusahaan tersebut, ia akan lebih membuat keputusan yang terbaik untuk seluruh pemegang saham yang tidak terkecuali adalah dirinya sendiri. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri (Mahadwartha 2002). Oleh sebab itu, dengan adanya kepemilikan manajerial diharapkan manajer dan prinsipal dapat memiliki kepentingan yang sejajar sehingga *conflict of interest* yang memicu *fraud* pun dapat dideteksi dan diminimalisir sejak dini.

2.9 Hubungan *Leverage* Dengan Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pada prinsipnya pendanaan perusahaan sangatlah penting untuk menjalankan operasional perusahaan. *Leverage* dalam penelitian ini merupakan perbandingan dari total liabilitas dibanding dengan ekuitas. Dengan hadirnya *leverage* di dalam struktur modal sebuah perusahaan menandakan perusahaan tersebut menghimpun pendanaan dari luar perusahaan dengan harapan untuk meningkatkan laba dari perusahaan kedepannya (Yahya, 2011).

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* keuangan yang tinggi dapat berakibat adanya kesulitan keuangan (*financial distress*) untuk dapat menyelesaikan kewajiban hutangnya karena berarti tingkat liabilitasnya lebih tinggi daripada ekuitas. Dengan kata lain *leverage* keuangan memiliki dampak

baik dan buruk bagi perusahaan, karena disisi lain *leverage* dapat menyebabkan perusahaan menjadi berkembang dengan adanya dana segar untuk peningkatan kinerja perusahaan akan tetapi juga dapat mengakibatkan kemunduran bagi perusahaan bahkan dapat berakibat pada kondisi kepailitan atau bangkrut. Dengan adanya tingkat *leverage* yang tinggi dapat menimbulkan kecenderungan pelaporan keuangan yang tidak reliabel oleh manajemen untuk menampakkan kinerja yang baik (*window dressing*) di mata pemegang saham. Oleh sebab itu, *leverage* dapat menjadi salah satu detektor dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan.

2.10 Hubungan Ukuran Perusahaan Dengan Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini terkait dengan jumlah aset perusahaan. Aset perusahaan yang tinggi memerlukan pengawasan dan pengendalian yang optimal yang dalam hal ini tentunya membutuhkan biaya. Pengawasan atas aset perusahaan daapt dilakukan melalui biaya agensi. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menaikkan biaya agensi. Peningkatan biaya agensi dikarenakan kebutuhan untuk pemantauan dan mekanisme pengendalian (Fama dan Jansen, 1983). Dari biaya agensi inilah pengendalian aset dilakukan. Semakin besar aset maka biaya agensi semakin meningkat dan hal tersebut akan mengurangi *fraud*.

2.11 Hubungan Pertumbuhan Dengan Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pertumbuhan data penelitian ini diproksikan melalui delta penjualan perusahaan yang terjadi. Penelitian oleh Owen-Jackson mengemukakan bahwa saat ketika perusahaan semakin besar dan bertumbuh, maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan meningkat pula. Hal ini karena penjualan sangat identik dengan piutang. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan tinggi merepresentasikan tingkat piutang yang tinggi pula. Namun seiring berjalannya waktu, banyak skandal kecurangan pelaporan keuangan yang menjadikan kinerja penjualan sebagai salah satu jalan untuk melakukan manipulasi salah satunya dengan *receivable overstatement* atau melebihiajikan piutang dalam rangka mempermanis laporan keuangan perusahaan. Untuk itu dalam penelitian ini, penjualan dijadikan sebagai salah satu proksi pendeteksi *fraud*.

2.12 Hubungan Ukuran KAP Dengan Kecurangan Pelaporan Keuangan

Ukuran KAP dalam hal ini adalah penggunaan auditor dari kelompok kantor akuntan publik *Big 4* atau non *Big 4*. Menurut Palmrose (1988) dalam Dechow et.al (1996) bahwa:

“Big eight (now Big six) audit firms are less frequently sued than other audit firms because they provide higher quality audit. Thus we hypoyhesize that the use of a Big Six Auditor will mitigate earning manipulation”

Penelitian De Angelo (1981) dalam Fijriantoro (2010) menyatakan bahwa auditor skala besar atau dalam hal ini auditor *Big 4* memiliki insentif yang

lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibanding auditor skala kecil. Auditor skala besar juga cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan. Argumen tersebut berarti bahwa auditor skala besar memiliki kemungkinan atau dorongan yang lebih untuk melaporkan masalah *going concern* kliennya apabila terbukti klien terdapat masalah untuk melangsungkan usahanya dibanding dengan auditor berskala kecil.

2.13 Penelitian Terdahulu

Terjadinya berbagai skandal *fraud* akhir-akhir ini membuat hilangnya kepercayaan investor terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sistem *good corporate governance* melalui pengawasan komite audit dipertanyakan. Penelitian Dechow et.al (1996) dan McMullen (1996) yang menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan negatif antara keberadaan komite audit dan kecurangan (*fraud*) pelaporan keuangan. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan yang dilakukan Abbott, Parker dan Peters (2004); Bedard, Chtourou dan Courteau (2004); Beasley (1996); Beasley et al. (2000) menemukan bahwa independensi komite audit dan keahlian keuangan dapat meningkatkan proses pelaporan keuangan. Owen-Jackson *et al* pada tahun 2009 melakukan penelitian mengenai hubungan karakteristik komite audit (independensi, keahlian keuangan, jumlah pertemuan dan masa kerja) dan proses kontrak (kepemilikan manajerial, *leverage*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan) terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Menariknya, dalam penelitian ini juga diambil sampel perusahaan

dengan *GCG* dan komposisi komite audit yang baik ternyata masih melakukan kecurangan pelaporan keuangan.

Kriteria komite audit yang lebih didasarkan hanya pada pendidikan dan karakteristik seperti independensi kurang mampu meyakinkan publik akan integritas dari komite audit. Pengalaman kerja pra komite audit seharusnya juga dipertimbangkan. Seorang komite audit yang memiliki latar belakang karir sebagai pemeriksa (auditor), akuntan dan bidang keuangan tentunya lebih mampu mendeteksi, lebih peka dan lebih paham akan tindakan kecurangan pelaporan keuangan. Maka dari itu penelitian ini mencoba menguji faktor lain yang dapat mendeteksi terjadinya *fraud*.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Sumber Data	Alat statistik	Hasil Penelitian
1	Beasley (1996)	Dependen : - Kecurangan dalam perusahaan Independen : - Komposisi <i>outside BOD</i> - Keberadaan komite audit	Accounting and Auditing Enforcement Release (AAER) issued by SEC and Wall Street Journal Index (WSJ)	Uji T, Wilcoxon dan Regresi Logistik	Komposisi <i>outside BOD</i> signifikan, sementara keberadaan komite audit tidak signifikan
2	Dechow, Sloan and Sweeny (1996)	Dependen : - Kecurangan dalam perusahaan	Accounting and Auditing Enforcement Release (AAER)	Analisis Deskriptif, Uji T, Regresi Logistik	Semua signifikan kecuali ukuran KAP

		<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Outside BOD -Keberadaan komite audit -Inside BOD -Leverage -Kepemilikan manajerial -Ukuran KAP 	issued by SEC		
3	Abbott, Park dan Parker, (2000)	<p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecurangan dalam perusahaan <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Komposisi komite audit -Pertemuan 	SEC	Analisis Deskriptif, Regresi Logistik, Mann-Whitney Test	Kedua variabel independen signifikan
4	Owen-Jackson et al . (2009)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kecurangan pelaporan keuangan <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Leverage -Kepemilikan manajerial -Independensi -Jumlah pertemuan -Keahlian keuangan -Masa kerja -Ukuran perusahaan -Pertumbuhan 	Accounting and Auditing Enforcement Release (AAER) issued by SEC	Regresi Logistik	Perusahaan dengan komite audit yang sepenuhnya independen, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan signifikan positif.
5	Ahmad, et al. (2010)	<ul style="list-style-type: none"> -Kepemilikan manajerial -Ukuran KAP -Ukuran perusahaan 	IRBM Kuala Lumpur	Analisis Deskriptif, Tobit Regression	Semua signifikan kecuali kepemilikan manajerial

2.14 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji pengaruh pengalaman tugas komite audit terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Dimana semakin seorang anggota komite audit berpengalaman maka proses dalam mendeteksi akan lebih efektif. Semakin berpengalaman maka tingkat sensitivitas terhadap ketidakberesan semakin tinggi. Komite audit yang memiliki pengalaman dalam penugasan sebelumnya terutama pengalaman sebagai pemeriksa, akuntan dan atau di bidang keuangan tentunya akan lebih mempertimbangkan banyak hal dalam penentuan sikapnya dalam rangka pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Libby dan Frederick (1990) mengemukakan bahwasanya pengalaman auditor dalam hal ini komite audit akan semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan auditnya. Jeffrey (1996) juga mengungkapkan bahwa seseorang yang lebih berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa.

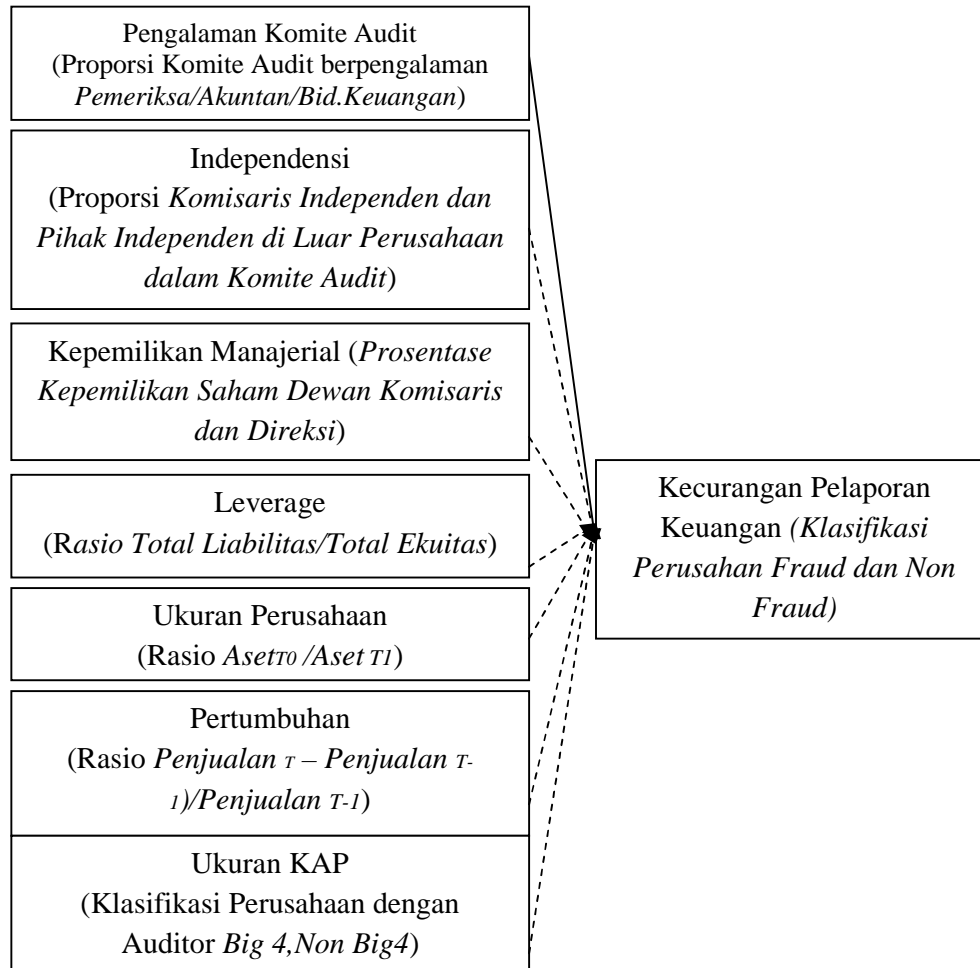
Di sisi lain, juga terdapat variabel kontrol yang berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Variabel kontrol ini dilihat dari penelitian terdahulu yakni independensi, *leverage*, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan dan ukuran KAP yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu oleh Beasley (1996) dan Dechow et.al (1996) menghasilkan bukti bahwa independensi, *leverage*, kepemilikan manajerial dan ukuran KAP berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan pelaporan

keuangan. Di sisi lain juga, Owen-Jackson (2009) melakukan penelitian dengan proksi independensi, kepemilikan manajerial dan ukuran KAP yang signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Ahmad (2010) juga mencetuskan hasil penelitian yang senada bahwa ukuran KAP dan ukuran perusahaan signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan namun kepemilikan manajerial tidak.

Teori agensi dalam hal ini juga mempengaruhi analisis dalam membangun model penelitian ini. Semakin besar kepemilikan manajerial tentunya akan semakin mengendalikan sikap oportunistik *agent* dan tentunya membantu dalam upaya pendeteksian kecurangan, begitu pula dengan independensi, pertumbuhan, leverage, ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Jika persentasenya semakin besar maka akan lebih dapat membantu dalam upaya pendeteksian adanya kecurangan pelaporan keuangan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.15 Hipotesis

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi seseorang terlebih komite audit dimana ia dapat berada di berbagai sector yang berbeda dan itu memperkaya wawasan dan pengetahuannya serta mengasah keahliannya terutama dalam mendeteksi *fraud*. Pengalaman juga membentuk komite audit mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam

pelaksanaan tugasnya serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan tugas dan profesi mereka setelah dikemudian hari. Pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam juga akan memberikan kemampuan untuk komite audit melihat ke depan, berekspektasi tentang apa yang mungkin terjadi di kemudian hari dan langkah-langkah preventif yang harus dilakukan terutama mengenai pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

H1: komite audit yang memiliki pengalaman pra komite audit sebagai pemeriksa, akuntansi dan/atau keuangan diduga memiliki kecenderungan lebih mudah dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan pelaporan keuangan. Tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh individu, manajemen maupun pihak ketiga yang menghasilkan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini termasuk kecurangan pelaporan keuangan (*fraud*).

Pengukuran kecurangan pelaporan keuangan dilakukan dengan menggunakan variabel dummy. Variabel dependen mengukur keterjadian kecurangan laporan keuangan (*fraud*) di perusahaan. Perusahaan yang terbukti melakukan *fraud* akan diberi skor 1 dan yang tidak terbukti melakukan *fraud* akan diberi skor 0.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengalaman tugas pra komite audit. Yang diukur dengan menggunakan proporsi anggota komite audit yang berpengalaman sebagai komite audit sebelumnya dibagi jumlah keseluruhan anggota komite audit.

$$\text{Pengalaman} = \frac{\text{Jumlah KA berpengalaman pemeriksa dan/atau akt-keu}}{\text{Jumlah keseluruhan anggota KA}}$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang mengontrol hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, karena variabel ini diduga ikut berpengaruh terhadap variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Independensi (*IND*)

Prinsip independensi sangat difokuskan terutama dalam hal menjaga kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Pentingnya independensi pada komite audit ditegaskan oleh Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-29/PM/2004 tgl. 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Independensi diukur dengan melihat proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi dan anggota independen (yang berasal dari luar perusahaan) dalam struktur komite audit.

$$\text{IND} = \frac{\text{Jumlah komite yang independen}}{\text{Jumlah keseluruhan anggota}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Manajerial (*MOWNER*)

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh dewan komisaris maupun dewan direksi dalam tahun pelaporan keuangan. Proksi untuk variable kepemilikan manajerial adalah dengan cara menjumlahkan prosentase saham yang dimiliki oleh jajaran direksi maupun komisaris perusahaan dalam tahun pelaporan keuangan.

3. Leverage (*LEV*)

Leverage merupakan pembentuk hutang dalam struktur modal yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Dalam penelitian ini, digunakan dua proksi, yakni *debt to equity ratio* dan *debt to total assets ratio*.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4. Ukuran Perusahaan (*SIZE*)

Mengacu pada penelitian Owen-Jackson (2009), ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan nilai buku aset perusahaan tahun sebelum terjadinya *fraud* dibagi nilai buku aset di tahun terjadinya *fraud*.

$$\text{SIZE} = \frac{\text{asset } t-1}{\text{asset } t}$$

5. Pertumbuhan Perusahaan (*GROWTH*)

Proksi dari variabel ini menggunakan delta penjualan tahun sebefore dan saat terjadinya *fraud*.

$$= \frac{\text{Net Sales } (t) - \text{Net Sales } (t-1)}{\text{Net Sales } (t-1)}$$

6. Ukuran KAP (*BIG 4*)

Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*, dengan nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh auditor *Big 4*, dan 0 jika sebaliknya.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Kecurangan Pelaporan Keuangan (X)	Owen - Jackson et. al (2009)	Variabel dummy: 0=perusahaan non <i>fraud</i> 1=perusahaan <i>fraud</i>	Nominal
Pengalaman Pra Komite Audit (Y)	Teori Agensi (Jensen, Meckling 1976) - Dengan adanya hubungan keagenan yang terjadi diharapkan pengalaman pra komite audit yang mumpuni dapat mengurangi konflik kepentingan yang ada dan mengurangi	Proporsi pengalaman Komite Audit sebagai Pemeriksa, akuntan dan atau di bid. Keuangan	Rasio

	mendeteksi terjadinya fraud akibat sikap oportunist dari hubungan keagenan tersebut		
Independensi	Owen - Jackson et. al (2009), Abbott, Park dan Parker, (2000)	Proporsi komisaris independen dan anggota independen (di luar entitas) dibagi jumlah keseluruhan komite audit.	Rasio
Kepemilikan Manajerial	Owen - Jackson et. al (2009), Dechow, Sloan and Sweeny (1996)	Proporsi kepemilikan saham dewan komisaris dan direksi	Rasio
Leverage	Owen - Jackson et. al (2009)	Rasio total liabilitas dibagi total ekuitas	Rasio
Ukuran Perusahaan	Owen - Jackson et. al (2009), Ahmad et al. (2010)	Rasio total asset tahun sebelum terjadinya fraud dibagi total asset saat terjadinya fraud	Rasio
Pertumbuhan	Owen - Jackson et. al (2009)	Prosentase perubahan penjualan dengan $(\text{Penjualan}_T - \text{Penjualan}_{T-1}) / \text{Penjualan}_{T-1}$	Rasio
Ukuran KAP	Dechow, Sloan and Sweeny (1996), Owen - Jackson et. al (2009), Ahmad et al. (2010)	Variabel dummy : 0 = Non Big 4 1 = Big 4	Nominal

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dipilih melalui metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

1. Populasinya seluruh perusahaan non perbankan yang ada terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012
2. Sampel penelitian adalah perusahaan – perusahaan non perbankan yang melakukan tindakan *fraud* sesuai pasal 69 dan peraturan VIII.G.7 pada tahun 2008 - 2012.

Selanjutnya sampel untuk perusahaan *non fraud* diambil secara berpasangan dengan melihat kriteria sebagai berikut:

- a) Bergerak dalam industri yang sama dengan perusahaan yang mengalami kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketimpangan data.
- b) Memiliki periode waktu yang sama dengan perusahaan yang mengalami kecurangan. Hal ini agar data lebih akurat. Nilai uang yang disajikan akan lebih akurat jika dibandingkan dalam tahun yang sama.
- c) Memiliki jumlah aset yang setara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa laporan tahunan yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) <http://www.idx.co.id>, *database* pasar modal pokok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang dan situs web resmi masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan periode 2008-2012.

3.5 Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logistik. Model ini dipilih dengan alasan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *non metrik* pada variabel dependen, sedangkan variabel independen variabel *data metrik dan non metrik*. Campuran skala pada variabel independen tersebut menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian bentuk fungsinya menjadi logistik dan tidak membutuhkan asumsi normalitas data pada variabel independennya. Analisis *logit* digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang mencerminkan dua pilihan atau sering disebut *binary logistic regression* (Ghozali, 2006).

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum untuk menggambarkan variabel pengalaman pra komite audit, independensi, kepemilikan manajerial, *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan ukuran KAP.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yakni menggunakan regresi logistik dimana variabel dependennya merupakan non metrik (variabel dummy) dan variabel bebasnya merupakan kombinasi antara variabel kontinyu (data metrik) dan kategorial (data non metrik). Campuran skala pada variabel bebas tersebut menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi. Teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2005).

Pengujian ini dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mampu mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%-10%. Model logit yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pengalaman anggota komite audit dalam mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan *fraud* pada suatu periode yang sama. Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi logistik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS16.

Adapun model regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Fraud = a + \beta_1 PENGALAMAN + \beta_2 INDEPENDENSI + \beta_3 MOWNER + \beta_4 LEVERAGE + \beta_5 SIZE + \beta_6 GROWTH + \beta_7 BIG4 + \epsilon$$

Dimana:

Fraud : variabel *dummy*, perusahaan yang melakukan *fraudulent financial reporting* (nilai 1) dan yang tidak (nilai 0)

a : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$: koefisien variabel

PENGALAMAN : pengalaman pra komite audit

INDEPENDENSI : independensi komite audit

MOWNER : kepemilikan manajerial

LEVERAGE : rasio *leverage*

SIZE : ukuran perusahaan

GROWTH : pertumbuhan perusahaan

BIG4 : ukuran KAP

ϵ : residual of error

Pada model regresi logistik, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dari output model tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

3.5.3 Uji Kelayakan Model (*Goodness-of-fit Test*)

Menurut Ghozali (2005), *goodness-of-fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan output dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness-of-fit test*, dengan hipotesis:

H0: Model yang dihipotesiskan fit dengan data

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

3.5.4 Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Dalam menilai *overall fit model*, dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Diantaranya:

a. *Cox and Snell's R Square dan Nagelkerke's R square*

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R square pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression*, maka digunakan Nagelkerke R square. Nagelkerke R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell R square untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox and Snell R square dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 2005).

b. Tabel Klasifikasi 2x2

Tabel klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini *fraud* (1) dan *non fraud* (0), sedangkan pada baris menunjukkan menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2005).

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2006). Antar variabel independen dalam sebuah model regresi sebaiknya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.9) maka hal tersebut menjadi indikasi adanya multikolinearitas.

- c. Selain itu dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya dan (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.